

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Keberadaan UMKM tidak dapat dihindarkan dari masyarakat saat ini. Kegiatan Usaha Kecil, Mikro dan Menengah (UMKM) mempunyai peran yang besar dalam pembangunan ekonomi nasional. Pertumbuhan dan pengembangan sektor UMKM sering diartikan sebagai salah satu indikator keberhasilan pembangunan, khususnya bagi negara-negara yang memiliki *income* perkapita yang rendah. Pertumbuhan ekonomi suatu Negara tidak terlepas dari peran Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang memiliki peran penting untuk pembangunan ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pengertian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 merupakan upaya ekonomi produktif yang dilakukan perseorangan ataupun badan usaha dengan perbedaan kriteria kekayaan bersih yang masing-masing usaha mikro sebesar Rp 50.000.000, 2 usaha kecil sebesar Rp 50.000.000 – Rp 500.000.000, dan usaha menengah sebesar Rp 500.000.000 – Rp 10.000.000.000.

Komunitas UMKM merupakan komunitas yang mempertemukan antara Pelaku UMKM dan Profesional Kewirausahaan. Dengan prinsip komunikasi positif dan saling membangun, Komunitas UMKM menjadi sarana penyampaian ilmu dan wadah interaksi bagi para pelaku usaha untuk saling berkontribusi, menyampaikan pemikiran, dan berbagi pengalaman dalam membangun serta mengembangkan jaringan usaha. Menurut Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Provinsi Lampung (2022) pertumbuhan usaha kecil menengah di Provinsi Lampung cukup bergeliat. Adapun pertumbuhan UMKM tersebut sekitar 9-10% per tahun. Bandar Lampung sebagai pusat perdagangan industri atau jasa di Provinsi Lampung

memiliki banyak UMKM dengan bidang usaha kuliner, *fashion*, otomotif dan cinderamata. Akan tetapi sejak tahun 2019 hingga 2022 terjadi kenaikan dan penurunan jumlah UMKM yang ada di Kota Bandar Lampung. Adapun data mengenai kenaikan dan penurunan jumlah UMKM tersebut dapat disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 1.1**  
**Jumlah UMKM di Kota Bandar Lampung Tahun 2019-2022**

Kategori Usaha	Tahun			
	2019	2020	2021	2022
Mikro	5303	1899	2502	6896
Kecil	70	34	26	2
Menengah	12	10	0	0

Sumber Data: Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bandar Lampung Tahun 2022

Tabel di atas menjelaskan bahwa pertumbuhan UMKM di wilayah Kota Bandar Lampung yang meliputi dari usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah yang tercatat pada tahun 2019 hingga tahun 2020 jumlah UMKM kategori usaha mikro mengalami penurunan hingga mencapai 64% dari total jumlah 5.303 menurun sebesar 1.899, selanjutnya penurunan disusul oleh kategori usaha kecil sebesar 51% dari total jumlah 70 menurun hingga mencapai 34 unit, selanjutnya kategori usaha menengah pun menurun mencapai 17% dari total jumlah 12 turun mencapai 10 unit. Namun berbeda di tahun sebelumnya, di tahun 2020 sampai 2021 data UMKM kota Bandar Lampung ada yang mengalami kenaikan yang signifikan yakni pada kategori usaha mikro yang mana meningkat hingga mencapai 31% dari total jumlah 1.899 naik hingga mencapai 2.502 unit, dan untuk kategori usaha kecil dan menengah sama seperti tahun sebelumnya yakni mengalami penurunan jumlah, untuk kategori usaha kecil mengalami penurunan sebesar 41% dari total jumlah 34 turun menjadi 20, dan terakhir untuk kategori usaha menengah mengalami penurunan yang sangat besar yakni sebesar 100% yang awalnya berjumlah 10 turun hingga mencapai 0 unit. terjadinya penurunan pada usaha kecil dan menengah diakibatkan kurang mampunya usaha tersebut untuk

mengelola keuangan, oleh karena itu UMKM harus memperhatikan Inklusi keuangan demi meningkatkan kesejahteraan UMKM.

Kegiatan keuangan inklusif menjadi salah satu agenda yang sangat penting di Indonesia khususnya para pelaku UMKM, dikarenakan dapat mendorong pemulihan dan ketahanan ekonomi bagi masyarakat khususnya UMKM. Yuliyanti, dan Pramesti (2021) menyatakan bahwa inklusi keuangan adalah ketersediaan akses untuk digunakan semua orang di dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya, seperti tabungan, kredit atau pinjaman, pembayaran, asuransi demi kesejahteraannya dengan atau melalui produk atau layanan jasa keuangan yang sudah tersedia baik secara formal maupun digital. Salwa, Rahma, dan Nasution (2022) inklusi keuangan menyatakan bahwa inklusi keuangan adalah segala upaya yang dilakukan untuk menghilangkan segala bentuk hambatan yang dihadapi masyarakat dalam menggunakan jasa-jasa keuangan. Berikut in tabel 1.2 data tingkat inklusi keuangan di Pulau Sumatera

**Tabel 1.2**  
**Data Tingkat Inklusi Keuangan di Pulau Sumatera**

No	Provinsi	Inklusi
1	Sumatera Utara	93,98
2	Kepulauan Riau	92,13
3	Riau	86,39
4	Aceh	86,09
5	Bengkulu	85,56
6	Sumatera Selatan	85,08
7	Sumatera Barat	66,75
8	Jambi	64,83
9	Bangka Belitung	64,57
10	Lampung	61,94

Sumber: Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2021

Menurut Survei Nasional Inklusi Keuangan 2021, Provinsi Lampung berada pada urutan ke-10 dari sepuluh provinsi yang ada di Pulau Sumatera. Tingkat tingkat inklusi Provinsi Lampung sebesar 61,94. Hal ini menunjukkan bahwa masih rendahnya pengetahuan tentang inklusi keuangan di Provinsi Lampung. Untuk mengetahui mengenai inklusi keuangan UMKM, peneliti melakukan

pra survei kepada 30 UMKM. Berikut ini Tabel 1.2 Hasil Pra survei UMKM Provinsi Lampung.

**Tabel 1.3**  
**Hasil Pra survei UMKM Provinsi Lampung**

No	Pernyataan	Jawaban		Persentase	
		Ya	Tidak	Ya	Tidak
1	Apakah UMKM anda sudah menggunakan QRIS	12	18	40%	60%
2	Apakah anda memahami QRIS	13	17	43%	57%
3	Apakah UMKM anda sudah mengikuti asuransi	10	20	33%	67%
4	Apakah UMKM sudah ada laporan keuangan	20	10	67%	33%
5	Apakah UMKM menggunakan pinjaman bank	14	16	47%	53%
Rata-Rata		13.8	16.2	46%	54%

Sumber: Hasil Pra Survei, 2023

Berdasarkan Tabel 1.3 tersebut menjelaskan bahwa rata-rata konsumen yang menjawab Ya terkait inklusi keuangan adalah 46%, sedangkan rata-rata konsumen yang menjawab Tidak terkait inklusi keuangan adalah 54%, hasil tersebut menunjukkan bahwa pelaku UMKM di provinsi Lampung belum memahami tentang inklusi keuangan. Rendahnya pengetahuan tentang inklusi keuangan tentunya turut berdampak pada pengetahuan tentang inklusi keuangan yang berkaitan dengan UMKM di Bandar Lampung, masih banyak UMKM yang tidak memiliki akses perbankan, belum sadar akan manfaat akses keuangan melalui akses yang telah tersedia tanpa biaya yang tinggi dan mengalami kesulitan untuk melakukan pinjaman terkait biaya atau modal usaha karena untuk memenuhi persyaratan yang ditawarkan oleh pihak bank, biasanya prosedur yang harus dilalui cukup lama serta persyaratan dan jaminan masih sulit dipenuhi oleh pelaku UMKM, sehingga modal yang sehingga dana pinjaman yang diajukan untuk memenuhi kebutuhan modal usaha sulit diperoleh (Kusuma ,2020). Sedangkan menurut Pradana dan Pradana terdapat hal-hal yang dapat mempengaruhi inklusi keuangan adalah literasi keuangan, financial technology (modal sosial), jenis kelamin, usia, pendapatan, dan pendidikan, namun dalam penelitian ini berfokus pada *digital financial technology* dan *financial literature*.

Perkembangan teknologi di era digital saat ini yang semakin pesat memicu berkembangnya *fintech (financial technology)*, kehadiran *fintech (financial technology)*, dapat membantu segala aktivitas keuangan. Yuliyanti, dan Pramesti (2021) menyatakan bahwa *financial technology* merupakan penggunaan *technology* di dalam *financial system* sehingga menghasilkan suatu produk, layanan, *teknologi* dan model bisnis baru yang akan berdampak pada kestabilan moneter, sistem keuangan, efisiensi, kelancaran, keandalan, dan keamanan sistem pembayaran. Ketersediaan *financial technology* ditunjukkan agar timbulnya aksesibilitas dalam masyarakat sehingga dapat menaikkan level inklusi keuangannya (Kerthayasa, dan Darmayanti,2023). Semakin tinggi masyarakat yang menggunakan layanan keuangan berbasis digital akan mendukung pencapaian implementasi keuangan inklusi oleh pemerintah. Ketersediaan layanan keuangan akan semakin luas dan dapat menjangkau masyarakat yang sebelumnya kesulitan dalam mengakses produk dan layanan keuangan (Liska, 2022)

Yoland (2022) menyatakan bahwa *financial technology (fintech)* merupakan perpaduan antara teknologi dan fitur keuangan atau dapat juga diartikan inovasi pada sektor finansial dengan sentuhan teknologi modern. Layanan ini tentunya akan memudahkan konsumen, dalam melakukan transaksi keuangannya melalui inovasi bank yang meluncurkan berbagai produk baru berbasis digital *technology*. Penelitian yang dilakukan oleh Widyaningsih, Siswanto dan Zusrony (2021) menyatakan bahwa *digital financial innovation* berpengaruh terhadap inklusi keuangan. Namun menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Kusuma (2020) menyatakan *digital financial innovation* tidak berpengaruh terhadap inklusi keuangan. *Research gap* ini menimbulkan celah riset untuk dilakukannya riset lanjutan terkait *digital financial innovation* terhadap inklusi keuangan.

Salah satu bentuk *digital Financial Innovation* adalah *Quick Response Indonesian Standard* (QRIS). *Quick Response Indonesian Standard* (QRIS) adalah standar kode QR pembayaran yang diinisiasi oleh Bank Indonesia bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) yang diluncurkan mulai 1 Januari 2020 untuk memfasilitasi *digital payment* di Indonesia dan khususnya untuk mendukung perkembangan sektor UMKM. QRIS merupakan kombinasi dari banyak kode QR yang disediakan untuk membuat proses transaksi pembayaran jauh lebih cepat, mudah, murah, aman, dan handal. Namun berdasarkan observasi yang dilakukan terhadap pelaku UMKM di Bandar Lampung belum memahami aturan penggunaan dari *Quick Response Indonesian Standard* (QRIS) dan para pelaku UMKM lebih suka bertransaksi secara cash dibandingkan melalui *Quick Response Indonesian Standard* (QRIS), sehingga transaksi melalui *Quick Response Indonesian Standard* (QRIS) belum maksimal.

Literasi keuangan berperan penting untuk meningkatkan kesadaran dan permintaan seseorang atas produk dan layanan keuangan. Pradana, dan Suarmanayasa (2022) literasi keuangan merupakan pondasi awal yang dibutuhkan seseorang dalam kehidupan pribadi ataupun di dalam pekerjaan, hal yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi. Ketika pemahaman tentang literasi keuangan, dapat dipastikan seseorang tersebut memiliki ketertarikan untuk memanfaatkan segala jenis layanan keuangan yang tersedia secara efektif. literasi keuangan mengacu pada pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan yang mempengaruhi sikap dan perilaku untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan (Kerthayasa, dan Darmayanti, 2023). Semakin tinggi tingkat literasi keuangan yang dimiliki seseorang akan menghasilkan perilaku keuangan yang bijak dan pengelolaan keuangan yang efektif (Salwa, Rahma, dan Nasution , 2022)

Bakhtiar, Prayoga, dan Mulya (2022) menyatakan bahwa literasi keuangan merupakan perpaduan dari pengetahuan serta keterampilan secara finansial, dan hal tersebut akan membantu pemilik usaha membuat keputusan dan pilihan finansial dengan bijak. Penelitian yang dilakukan oleh Sari (2022) menyatakan bahwa *financial literature* berpengaruh terhadap inklusi keuangan. Namun menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Romadhon, dan Rahmadi (2020) menyatakan *financial literature* tidak berpengaruh terhadap inklusi keuangan. *Research gap* ini menimbulkan celah riset untuk dilakukannya riset lanjutan terkait literasi keuangan terhadap inklusi keuangan. Berikut in tabel 1.4 data tingkat literasi keuangan di Pulau Sumatera

**Tabel 1.4**  
**Data Tingkat Literasi Keuangan di Pulau Sumatera**

No	Provinsi	Literasi
1	Sumatera Utara	37,96
2	Kepulauan Riau	45,67
3	Riau	43,19
4	Aceh	44,36
5	Bengkulu	34,12
6	Sumatera Selatan	40,05
7	Sumatera Barat	34,55
8	Jambi	35,17
9	Bangka Belitung	35,70
10	Lampung	30,79

Sumber: Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2021

Menurut Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2021, Provinsi Lampung berada pada urutan ke-10 dari sepuluh provinsi yang ada di Pulau Sumatera. Tingkat literasi di Provinsi Lampung sebesar 30,79 hal ini menunjukkan bahwa masih rendahnya pengetahuan tentang literasi keuangan di Provinsi Lampung. Rendahnya pengetahuan keuangan para pelaku UMKM di Bandar Lampung terlihat dari tidak memisahkan keuangan pribadi dan bisnis, tidak mengasuransikan UMKM yang dimiliki dan tidak melakukan peminjaman untuk menambah modal.

Komunitas UMKM di Bandar Lampung telah menjadi bagian dari motor penggerak pertumbuhan ekonomi khususnya di provinsi Lampung. Berdasarkan observasi pra penelitian, fenomena yang terjadi ditemukan bahwa masih ada sebagian UMKM yang ada di Bandar Lampung yang belum menggunakan secara maksimal dari QRIS. Hal ini menunjukkan bahwa UMKM di Bandar Lampung khususnya masih belum memiliki kemampuan untuk mengakses informasi keuangan dalam lembaga keuangan secara optimal. Kemampuan dan pengetahuan tentang pengelolaan yang sederhana dan penggunaan teknologi dapat meningkatkan pengembangan usaha. Berdasarkan latar belakang, fenomena dan *research gap* di atas maka penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul “**Pengaruh *Digital Financial Innovation* dan *Financial Literature* Terhadap Inklusi Keuangan Pada Komunitas UMKM di Bandar Lampung.**”

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan dan uraian pada latar belakang diatas , maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah :

1. Apakah *digital financial innovation* berpengaruh terhadap inklusi keuangan pada Komunitas UMKM di Bandar Lampung ?
2. Apakah *financial literature* berpengaruh terhadap inklusi keuangan pada Komunitas UMKM di Bandar Lampung ?
3. Apakah *digital financial innovation* dan *financial literature* berpengaruh terhadap inklusi keuangan pada Komunitas UMKM di Bandar Lampung ?

## **1.3 Ruang Lingkup Penelitian**

### **1.3.1 Ruang Lingkup Subjek**

Subjek dalam penelitian ini adalah Komunitas UMKM di Bandar Lampung

### **1.3.2 Ruang Lingkup Objek**

Ruang lingkup objek penelitian ini adalah *digital financial innovation*, *financial literature* dan inklusi keuangan

### **1.3.3 Ruang Lingkup Tempat**

Ruang Lingkup Tempat yang digunakan dalam penelitian ini adalah Komunitas UMKM di Bandar Lampung

### **1.3.4 Ruang Lingkup Waktu**

Ruang lingkup waktu yang ditentukan pada penelitian ini adalah waktu yang berdasarkan kebutuhan penelitian yang dilaksanakan pada bulan Oktober 2022 sampai Februari 2023

### **1.3.5 Ruang Lingkup Ilmu Pengetahuan**

Ruang lingkup ilmu pengetahuan adalah Manajemen Keuangan yang meliputi *digital financial innovation*, *financial literature* dan inklusi keuangan

## **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah. maka peneliti menetapkan tujuan penelitian yaitu.

1. Untuk mengetahui pengaruh *digital financial innovation* dan *financial literature* terhadap inklusi keuangan pada Komunitas UMKM di Bandar Lampung
2. Untuk mengetahui pengaruh *digital financial innovation* dan *financial literature* terhadap inklusi keuangan pada Komunitas UMKM di Bandar Lampung
3. Untuk mengetahui pengaruh *digital financial innovation* dan *financial literature* terhadap inklusi keuangan pada Komunitas UMKM di Bandar Lampung

## **1.5 Manfaat Penelitian**

### **1.5.1 Bagi Peneliti**

Penelitian ini dilakukan untuk mengimplementasikan ilmu dan pengetahuan yang diperoleh selama perkuliahan terutama dibidang keuangan, khususnya *digital financial innovation*, *financial literature* dan inklusi keuangan

### **1.5.2 Bagi Institusi**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan bahan kajian yang dijadikan referensi bagi pembaca dan peneliti lain yang

melakukan penelitian dengan jenis pembahasan yang sama serta diharapkan dapat menambah wawasan bagi para mahasiswa/mahasiswi Institut Informatika Dan Bisnis Darmajaya, terutama bagi mahasiswa/mahasiswi yang mengambil konsentrasi keuangan.

### **1.5.3 Bagi Komunitas UMKM di Bandar Lampung**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pertimbangan oleh investor untuk dapat meningkatkan inklusi keuangan Komunitas UMKM di Bandar Lampung

## **1.6 Sistem Penulisan**

Adapun sistematika penulisan laporan penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **Bab I Pendahuluan**

Bab ini menjelaskan latar belakang masalah yang ada dalam perusahaan dan dirumuskan dalam perumusan masalah. ruang lingkup dari penelitian. tujuan penelitian. manfaat dari penelitian dan sistematika dari penelitian.

### **Bab II Landasan Teori**

Bab ini menguraikan landasan teori dan tinjauan empiris yang relevan dengan permasalahan yang diteliti berdasarkan kerangka pikir dan hipotesis.

### **Bab III Metode Penelitian**

Bab ini berisikan tentang metode yang akan digunakan dalam penelitian. populasi dan sampel. sumber data. variabel penelitian. operasional variabel. teknik analisis data. uji persyaratan instrumen. metode analisis data. teknik analisis data. dan pengujian hipotesis.

### **Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Dalam bab ini hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan peneliti dengan berpedoman pada teori dan metode yang dikemukakan pada Bab II dan III.

## **Bab V Simpulan dan Saran**

Bab ini berisikan simpulan dan saran yang berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada Bab IV.

## **Daftar Pustaka**

## **Lampiran**